Berita Dewan Pers

Edisi Mei 2017

DEWANPERS

Etika

Menjaga dan Melindungi Kemerdekaan Pers

foto: wapres.go.id

PUNCAK PERINGATAN -- Presiden Joko Widodo menghadiri puncak peringatan World Press Freedom Day 2017 di Jakarta Convention Center, Rabu (3/5/2017) malam. (ranews.tv)

WPFD 2017: Komitmen Indonesia Terhadap Kemerdekaan Pers

Wartawan Korban Kekerasan Kerap Pilih Damai

Krisis dalam Jurnalisme

WPFD 2017: Komitmen Indonesia Terhadap Kemerdekaan Pers

PEMBUKAAN – Wakil Presiden Jusuf Kalla berfoto bersama sejumlah tokoh penting dalam acara pembukaan World Press Freedom Day 2017 di Jakarta Convention Center, Rabu (3/5/2017).

Foto: Istimewa

Serangkaian kegiatan terkait peringatan World Press Freedom Day 2017 pada tanggal 1 hingga 4 Mei 2017 lalu di Jakarta Convention Center yang bertemakan "*Critical Minds for Critical Times: Media's Role in Advancing Peaceful, Just, and Inclusive Society*", berjalan lancar dan dapat pujian dari sebagian peserta, terutama peserta luar negeri.

Beberapa peserta Internasional mengakui bahwa WPFD 2017 ini adalah WPFD paling meriah dengan peserta paling banyak selama 10 tahun terakhir. Total peserta mencapai 2.000 orang dengan 472 peserta internasional yang berasal dari 94 negara.

Pembukaan resmi dilakukan pada 3 Mei 2017 oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla dengan pemukulan gong yang dihadiri Dirjen UNESCO Irina Bokova, Menko Polhukam Jendral TNI Purn. Wiranto, Pimpinan DPR RI Fahry Hamzah, Menteri Kominfo Rudiantara, Menteri Pendidikan Prof. Dr. Muhajir Effendy. M.A.P., Ketua Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO (KNIU) Prof. Dr. Arief Rachman, mantan Presiden Timor Leste dan pemenang Nobel Ramos Horta, dan sejumlah undangan lain. Termasuk sejumlah dutabesar negara sahabat.

Dalam kata sambutan, Jusuf Kalla menyatakan bahwa Indonesia berkomitmen menjaga kemerdekaan pers. "Sejak reformasi, pers di Indonesia bebas. Siapa saja boleh membuat perusahaan pers. Untuk itu saya kira adalah penting untuk menjaga kebebasan pers yang bertanggungjawab karena negara tidak lagi memberlakukan penyensoran. Oleh karena itu media harus menjadi sensor internal bagi institusinya," ujar JK -- begitu sering disapa -- seraya menambahkan "kebebasan pers menimbulkan konsekuensi bahwa tanggungjawab bukan lagi pada *censorship*, tapi pada kredibilitas internal media dan masyarakat."

Menurut JK, hal penting yang harus menjadi pertimbangan dalam kebebasan adalah ada keadilan di atas kebebasan. Di atas keadilan ada kedamaian yang harus tercipta. "Apabila media bebas tapi tidak ada kedamaian akan menimbulkan konflik. Dalam hal ini, tentu media harus bertanggung jawab," kata JK.

Begitu juga sebaliknya, jika ketidakadilan atau konflik sedang terjadi di suatu bangsa, maka media harus berbuat sesuatu dalam upaya menciptakan keadilan atau berupaya meredam konflik itu. Media, kata JK, harus meluruskan penyimpangan sehingga terciptanya keadilan, perdamaian, dan kemajuan di suatu negara.

Gangguan Hoax

Pada malam hari Presiden Joko Widodo datang menghadiri penyerahan Penghargaan "Guillermo Cano". Pada WPFD 2017 ini yang mendapatkan penghargaan "Guillermo Cano" adalah seorang jurnalis asal Eritrea, Dawit Isaak yang sudah 15 tahun terakhir tidak diketahui keberadaannya,

termasuk apakah ia masih hidup atau sudah mati. Pada malam itu Dawit Isaak diwakili oleh putrinya, Betlehem Isaak, yang kini mukim di Swedia.

Dawit meraih penghargaan atas keberanian, komitmen, serta perjuangannya membela kebebasan berpendapat. Dia pernah ditangkap pada September 2001 saat terjadi kericuhan dan penyerangan terhadap media di Eritrea, sebuah negara di kawasan Afrika. (*Lebih lanjut tentang penghargaan ini di halaman lain – Red)*

"Saya ingin memberi selamat kepada peraih penghargaan Guillermo Cano World Press Freedom Prize yang diwakili Nona Betlehem dan kepada anda semua insan pers, selamat merayakan hari kebebasan pers dunia yang begitu meriah," kata Jokowi yang disambut tepuk tangan hangat dari hadirin.

Dalam sambutannya di tengah gala dinner, Presiden Jokowi menyampaikan penilaiannya bahwa peran media begitu besar dalam perjalanan demokrasi yang dinamis di Indonesia. Peranan media di Indonesia sejak zaman reformasi di Indonesia juga begitu penting dalam mengawal pemerintahan yang terbuka dan memberantas korupsi serta kebebasan politik. "Namun insan pers di Indonesia dan dunia saat ini tengah menghadapi gangguan berupa berita hoax dan berita palsu (*fake news*), " kata Jokowi.

Ia menambahkan, lewat pencerahan oleh media, publik diselamatkan dari jalan sesat yang ditawarkan hoax. Pelurusan oleh media massa membuat masyarakat mendapat informasi yang benar. "Jangan ada berita yang *nggak* benar malah *nggak* diluruskan, malah diangkat atau diviralkan," kata Jokowi.

Untuk itu Presiden Jokowi mengajak semua pihak untuk ikut menanggulanginya. "Saya ingin mengatakan kepada anda para insan pers nasional dan kepada anda sekalian para insan pers internasional bahwa kami tidak dapat melakukannya tanpa partisipasi anda semua," ujar Jokowi.

Diskusi-diskusi

Dalam rangkaian peringatan WPFD 2017 ini, pada tanggal 1-2 Mei 2017 yang merupakan *side event* digelar berbagai diskusi dengan beragam topik dengan melibatkan semua konstituen Dewan Pers. Antara lain perihal berita hoax dan cara melawannya, keselamatan wartawan, media literasi dan jurnalisme warga, pengembangan televisi lokal, kebebasan pers di era konvergensi, verifikasi dan pengecekan fakta, dan lain-lain. Sedangkan pada tanggal 3 dan 4 diisi dengan berbagai diskusi panel dan diskusi pararel dengan topik-topik yang diminati oleh peserta dalam dan luar negeri. Hampir semua ruangan penuh karena diminati peserta.

Penutupan dilakukan oleh Menteri Kominfo Rudiantara pada tanggal 4 Mei malam yang dimeriahkan oleh pukulan puluhan bedug dol dari Bengkulu. Mewakili tuan rumah, Rudiantara menyerahkan patung garuda yang menyengkeram bola dunia dari bahan kayu kepada Asisten Dirjen UNESCO Frank La Roe. Patung tersebut secara simbolis nantinya akan diserahkan oleh Dutabesar Indonesia untuk Perancis, Hotmangaraja Panjaitan, di Paris kepada perwakilan negara yang akan terpilih menjadi tuan rumah WPFD 2018. Kandidat tuan rumah WPFD 2018 belum diputuskan. Ada 2 negara yang akan dipilih yaitu antara India atau Colombia.

Rudiantara dalam pidato penutupannya menyatakan, "Suatu kehormatan bagi Indonesia menjadi tuan rumah World Press Freedom Day 2017. Indonesia telah bertekad untuk terus memberikan kebebasan berekspresi sebagai bagian dari demokrasi dan hak asasi manusia," ungkapnya.

Sebagai penutup Rudiantara mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Dewan Pers dan UNESCO yang telah mensukseskan World Press Freedom Day 2017. "Saya percaya kolaborasi ini telah memberikan hasil bagi pengembangan kebebasan berekspresi di dunia," kata Rudiantara.

WPFD 2017 menghasilkan Deklarasi Jakarta yang berisikan 74 butir kesepakatan di mana media diharapkan dapat berperan dalam mengembangkan perdamaian dan mendorong terwujudnya masyarakat yang inklusif di seluruh dunia.

Terpilihnya Indonesia sebagai tuan rumah WPFD 2017 ini adalah sebuah kepercayaan dunia internasional kepada Indonesia. Indonesia dipilih karena dinilai sebagai negara demokrasi no 3 terbesar di dunia yang memiliki puluhan ribu media dengan undang-undang yang menjamin kemerdekaan pers. Dan, atas kerja sama yang baik dari berbagai kementerian dan lembaga, Indonesia berhasil meletakkan standar pelaksanaan WPFD yang tinggi. Khususnya bagi pelaksanaan WPFD berikutnya. ***(Red/SAP)*** ***

"Guillermo Cano" untuk Dawit Isaak

SAMBUTAN -- Betlehem Isaak mewakili ayahnya, Dawit Isaak, ketika memberikan sambutan atas penghargaan Guillermo Cano pada acara puncak peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia 2017 di Jakarta Convention Center, Rabu (3/5/2017) malam.

Foto: Istimewa

UNESCO memberikan penghargaan "Guillermo Cano" kepada jurnalis berkewarganegaraan Eritrea, Dawit Isaak, pada acara puncak peringatan Hari Kemerdekaan Pers Sedunia 2017, di Jakarta Convention Center, Rabu (3/5/2017) malam. Dawit sudah 15 tahun terakhir tak diketahui keberadaannya, termasuk apakah ia masih hidup atau sudah mati.

Dawit meraih penghargaan atas keberanian, komitmen, serta perjuangannya membela kebebasan berpendapat. Dia pernah ditangkap pada September 2001 saat terjadi kericuhan dan penyerangan terhadap media di Eritrea, sebuah negara di kawasan Afrika.

Pada upacara penghargaan "Guillermo Cano" kali ini, Direktur Jenderal UNESCO Irina Bogova memberikan penghargaan tersebut kepada Dawit Isaak melalui putrinya, Betlehem Isaak. Sekadar informasi, UNESCO memberikan penghargaan semacam ini setiap tahun kepada perseorangan atau institusi yang berperan memajukan kemerdekaan pers.

Nama Guillermo Cano diambil dari nama jurnalis Kolombia, Guillermo Cano Isaza, yang dibunuh terkait pemberitaannya mengenai kartel narkoba. Guillermo ditembak di depan kantornya pada 17 Desember 1986. Sejak tahun 1997, UNESCO resmi menggunakan nama Guillermo sebagai salah satu penghargaan bagi pegiat bidang jurnalistik.

Dalam pidatonya, Irina mengatakan, sosok Dawit sebagai jurnalis memiliki keberanian dalam mewujudkan dan memajukan kemerdekaan pers di negaranya meski harus mengorbankan dirinya sendiri.

"Penghargaan ini didedikasikan kepada Dawit Isaak, seorang jurnalis yang berperan dalam memajukan kemerdekaan pers di negaranya," ujar Irina seraya menambahkan "memperjuangkan kemerdekaan pers yang bersifat fundamental memang memerlukan determinasi dan keberanian."

Semangat Dawit

Setelah Eritrea merdeka secara de jure dari Etiopia pada 24 Mei 1993, Dawit mendirikan media massa independen pertama bernama Setit.

Dalam perjalanannya memperjuangkan kemerdekaan pers, Dawit dipenjara selama 16 tahun tanpa proses pengadilan sejak September 2001 bersama dengan 10 jurnalis independen lainnya. Sampai saat ini pun dia belum pernah diadili. Tidak ada yang mengetahui di mana Dawit dipenjara kini.

Betlehem Isaak mengatakan, semangat Dawit Isaak diharapkan dapat menyebar untuk membangun kebebasan, keadilan sosial dan perdamaian di Eritrea.

"Sekarang hidupnya telah menjadi inspirasi saya dan saya mengerti pilihan, nilai dan aspirasinya. Saya paham perjuangan dan dedikasinya untuk keadilan sosial, perdamaian dan stabilitas yang lebih dibutuhkan sekarang", pungkasnya sambil menahan jatuhnya air mata. ***(kompas.com/Sh.net)***

Kekerasan Terhadap Wartawan

Menkominfo: Perlu Investigasi Mendalam

foto: MetroTVnews

PENUTUPAN -- Menkominfo Rudiantara bersama sejumlah hadirin dan panitia berfoto dan bergembira seusai penutupan resmi penyelenggaraan WPFD yang sukses,, di JCC, Kamis (4/5/ 2017).

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menilai perlunya investigasi yang mendalam untuk mengusut kasus kekerasan terhadap wartawan. Beberapa kasus kekerasan terhadap wartawan bahkan tidak tuntas hingga proses pengadilan.

"Menurut saya itu harus dilakukan investigasi agar tak terjadi kecurigaan," kata Rudiantara usai menutup acara World Press Freedom Day 2017 di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Kamis (4/5/2017).

Sebagai eksekutif, ia sendiri mengaku tak bisa menginisiasi tindakan pendalaman kasus. Sebab dalam UU 40 Tahun 1999 tentang kebebasan pers, Pemerintah tak bisa mengintervensi.

Namun ada Dewan Pers yang bisa melakukan kerjasama dengan Penegak Hukum terkait hal ini. Berkaca pada kasus-kasus kekerasan selama ini, Rudiantara menyebut hanya 4 dari 70 lebih kasus yang dikategorikan sebagai kekerasan.

Lainnya setelah ditindaklanjuti ternyata hanya bersifat salah paham. Adapun Dewan Pers mengaku telah membuat kesepakatan dengan Polri dan TNI dalam rangka mencegah kekerasan. "Harus investigasi, sampai ketahuan apakah ini benar kasus kekerasan atau bukan," kata Rudiantara.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta wartawan obyektif dalam menulis berita. Sikap itu merupakan kewajiban dan diperlukan oleh pekerja media.

"Coba anda tulis dengan obyektif. Jangan mau hak tetapi tidak mau kewajiban," kata JK -- demikian Jusuf Kalla akrab disapa -- usai membuka World Press Freedom Day 2017 di JCC Senayan, Jakarta, Rabu (3/5/ 2017).

Kekerasan kepada pewarta, menurut JK, salah satunya disebabkan isi berita. Karena itu perlu cara kerja obyektif dan memuliakan fakta dalam laporan jurnalistik. "Kalau anda menulis hal fitnah pasti orang marah juga kan," sambung JK

Terkait hal itu, UNESCO mendorong pihak berwenang untuk menginvestigasi setiap kasus kekerasan terhadap wartawan. Assistant Director General UNESCO Frank La Rue mengatakan, jurnalis merupakan profesi yang dilindungi baik ketika mencari informasi ataupun hak untuk melindungi narasumber.

Setiap kasus kekerasan terhadap wartawan baik kriminalitas maupun kesalahan, harus diungkap demi menghindari impunitas pelaku. "Kita tidak tahu apa yang terjadi sebelum investigasi," kata Frank.

Meningkat Tajam

Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia Suwarjono mengatakan, jumlah kasus kekerasan terhadap jurnalis meningkat tajam sejak 2015 hingga 2016.

Pada 2014 tercatat ada 42 kasus kekerasan. Pada 2015, jumlahnya meningkat menjadi 44 kasus.

Kemudian pada 2016 naik menjadi 78 kasus. "Kasus kekerasan terhadap jurnalis meningkat tajam. Pada 2016 kenaikannya hampir 100 persen," ujar Suwarjono dalam sesi diskusi di JCC, Rabu (3/5/2017).

Sementara itu, berdasarkan data yang dihimpun AJI Indonesia sepanjang Mei 2016 hingga April 2017, telah terjadi 72 kasus kekerasan terhadap jurnalis. Sebanyak 38 kasus di antaranya berupa kekerasan fisik dan 14 kasus berupa pengusiran atau pelarangan liputan.

Menurut Suwarjono, lemahnya penegakan hukum menjadi penyebab utama meningkatnya kasus kekerasan terhadap jurnalis. "Tidak ada satupun para pelaku yang diproses hukum. Adanya pembiaran semacam itu, maka kekerasan terus terjadi. Orang dengan mudah merampas bahkan menyerang jurnalis saat bertugas karena lemahnya penegakan hukum," ujarnya.

Selama dua tahun terakhir, tambah Suwarjono, tidak ada kasus kekerasan terhadap jurnalis yang diproses hingga tuntas. "Praktik impunitas terus berjalan dalam kasus kekerasan terhadap jurnalis", ujarnya. ***(metrotvnews.com/MI/kompas.com)***

Wartawan Korban Kekerasan Kerap Pilih Damai

Wartawan korban kekerasan kerap menyelesaikan masalah dengan jalan damai. Kekerasan kerap terjadi kepada wartawan yang memaksa narasumber memberi keterangan meski menolak diwawancara.

"Ternyata banyak yang mengalami kekerasan memilih jalan damai dengan orang yang melakukan kekerasan. Kemudian mengganti peralatannya," kata Ketua Dewan Pers, Yosep Stanley Adi Prasetyo di JCC, Selasa (2/5/2017)

Stanley membantah tudingan sejumlah pihak yang menyebut Dewan Pers kurang gesit menindaklanjuti laporan kekerasan. Stanley mengungkapkan, berdasarkan data Aliansi Jurnalis Independen (AJI), ada 78 kasus kekerasan pada wartawan pada 2016. Namun, yang ditangani Dewan Pers hanya tiga sampai empat kasus. Sisanya diselesaikan dengan jalan damai.

Stanley mengatakan, pihaknya tak bisa melarang jurnalis menempuh jalan damai. "Dewan Pers tidak punya kewenangan melarang dan tidak bisa memaksa mereka menempuh jalur hukum," terangnya.

Menurutnya, kekerasan terhadap profesi jurnalis antara lain juga akibat sikap tidak profesional wartawan. Misalnya, ada pemaksaan kepada nara sumber untuk melakukan wawancara, padahal narasumber merasa terganggu. Ujungnya, kekerasan terjadi dan pewarta menjadi korban.

Atas dasar itu Dewan Pers menekankan pentingnya kompetensi wartawan dalam profesi jurnalistik. Bukan hanya terkait tulis menulis dan reportase tapi juga standar perilaku para pewarta.

"Karena itulah Dewan Pers mendorong agar wartawan mengikuti uji kompetensi. Ada 27 lembaga penguji kompetensi, silahkan ikuti. Dewan pers tidak ikut menyelenggarakan," ujarnya. ***(metrotvnews.com/Antara)***

Penyebaran Berita Bohong dalam Tahap Serius

ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

DISKUSI – Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers Imam Wahyudi menyampaikan pendapatnya dalam Parallel Session 7 World Press Freedom Day (WPFD) 2017 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Kamis (4/5).

Dewan Pers menyatakan penyebaran hoax atau berita bohong sudah memasuki tahap serius di Indonesia dan berkembang pesat saat pemilu. "Di Indonesia *'fake news'* masuk tahap serius," kata Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers Imam Wahyudi saat menjadi pembicara dalam diskusi bertajuk *How fake(d) news and social media filter bubbles impact the role of journalism in society* di sela kegiatan World Press Freedom Day 2017, di Jakarta, Kamis (4/5/2017)

Imam memandang berita bohong memiliki rentang yang sangat lebar, mulai dari yang satir untuk menyindir sampai yang dipublikasikan melalui berbagai kanal informasi.

Menurut dia, awalnya masyarakat mencari kebenaran atas informasi bohong melalui media *mainstream*. Namun saat ini informasi bohong justru masuk ke dimensi lain di media sosial dan diadopsi begitu saja di media *mainstream* tanpa klarifikasi. Akibatnya, kata dia, masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap media *mainstream*. "Di *'local election'*, *'fake news'* tumbuh dengan sangat cepat, ini juga ancaman terus-menerus bagi kita di Indonesia, setiap tahun kita berhadapan dengan *'fake news'*," ujar dia.

Dia menekankan, di Indonesia berita bohong digali hingga ke isu-isu lain termasuk isu sentimen agama. "*'Fake news'* sudah mengancam eksistensi pers sebagai pilar keempat demokrasi," jelas dia.

Menurut Imam, saat ini Dewan Pers dan masyarakat pers Indonesia tidak dalam posisi ingin membuat peraturan baru mengenai berita bohong karena pemberitaan bohong bisa disikapi masyarakat dengan berpegang pada aturan-aturan yang ada.

"Contohnya untuk melindungi kehormatan individu-individu yang terkena dampak berita bohong, di Indonesia sudah ada undang-undang yang melindungi itu," kata dia.

Yang terpenting, kata Imam, ada literasi media yang dilakukan dengan memberikan pendidikan kepada publik.

Standar Rendah

Dalam pada itu, praktisi media dari salah satu televisi swasta di Indonesia Don Bosco Salamun mengatakan bahwa standar jurnalis yang rendah berisiko ditunggangi kepentingan politik yang tidak bertanggung jawab.

Hal tersebut diungkapkan Don Bosco dalam salah satu sesi dialog World Press Freedom Day 2017 di Jakarta, Senin (1/5/2017) siang. Menurut dia, hal tersebut dapat merusak esensi kebebasan pers.

"Ini merusak esensi kebebasan pers. Seharusnya kebebasan ini bisa dinikmati agar menjadi sesuatu yang bagus dan bukan malah buruk," kata Direktur Pemberitaan Metro TV itu.

Ia menjelaskan, permasalahan tersebut justru tumbuh pada masa reformasi yang memunculkan

Bagi Bunga -Sejumlah jurnalis di Malang saat membagikan bunga mawar dalam memperingati World Press Freedom Day atau Hari Kebebasan Pers Dunia di depan Balai Kota Malang, Rabu (3/5/2017)(KOMPAS.com/Andi Hartik)

jurnalis-jurnalis baru dalam jumlah yang sangat signifikan. Jika sebelum reformasi jumlah jurnalis di Indonesia hanya sekitar 3.000 - 4.000 orang, angka tersebut naik menjadi 10 kali lipat pasca reformasi.

"Di era itu ada lebih dari 40.000 jurnalis. Ini memang jumlah yang bagus terkait kebebasan pers, tapi di tengah itu tumbuh juga yang standarnya rendah yang kemudian membuat bisnis atau menunggangi media dengan kepentingan politik," kata dia.

Meskipun memiliki kekurangan, namun ia menilai pasca reformasi merupakan masa ternikmat bagi kebebasan pers di Indonesia setelah mengalami banyak tekanan pada pemerintahan Orde Baru.

Menurut dia, kebebasan pers saat ini tidak hanya dinikmati oleh insan pers yang terjun di media, namun juga masyarakat yang bisa mengakses segala macam informasi melalui perangkat teknologi.

"Tidak hanya jurnalis yang bisa menyebarkan informasi, masyarakat pun bisa dengan membuat blog, vlog, dan sebagainya atau menerima sumber informasi yang tidak terbatas," tutur Don Bosco.

Praktik tersebut merupakan bagian dari fase *"3rd Screen"*, katanya melanjutkan, yaitu pola masyarakat yang menerima informasi dari layar gawai masing-masing. Sedangkan pada fase *"1st Screen"* ialah bentuk penerimaan informasi media dari layar televisi, dan fase *"2nd Screen"* ada pada penerimaan informasi melalui monitor komputer. ***(antaranews.com/tirto.id)***

Krisis dalam Jurnalisme

Oleh SH Sarundajang

Media berita telah menjadi kunci penggerak jurnalisme bagi masyarakat pada masa lalu. Namun, perkembangan dekade terakhir telah mengubah pemahaman ini.

Teknologi, ekonomi, dan transformasi politik yang tak terelakkan membentuk kembali lanskap komunikasi. Peliputan peristiwa-peristiwa besar seperti pemilihan umum serta referendum belakangan ini telah menimbulkan banyak pertanyaan tentang kualitas, dampak, dan kredibilitas jurnalisme, dengan kepentingan yang sangat luas.

Ada pemahaman bahwa media tradisional kehilangan kontrol atas definisi pemberitaan dan posisi utamanya sebagai sumber utama berita masyarakat. Hal ini telah digantikan desentralisasi, teknologi media yang diatur sesuka hati. Yang lain berpendapat bahwa merek berita tradisional tetap penting bagi generasi berita asli dan informasi tepercaya, serta setidaknya dalam teori merupakan jaminan kredibilitas.

Ada juga pandangan yang menyambut perluasan pluralisme media melalui munculnya media sosial, dan melihat ini sebagai alternatif selain jurnalisme tradisional (*mainstream*) yang terlalu sering mengalami penurunan dari standar profesional. Namun, perspektif lain menyesalkan potensi yang disediakan medsos bagi masyarakat, justru terperangkap dalam kepompong informasi yang tertutup serta ketidakmampuannya untuk membedakan kebenaran dari rekayasa.

Adalah benar yang disampaikan John Lloyd, wartawan harian *Financial Times*, yang menyampaikan bahwa "surutnya peran surat kabar secara fisik dan berpindah ke media internet telah menempatkannya ke dalam arus besar informasi, fantasi, bocoran, teori konspirasi, ekspresi kebajikan dan kebencian".

Penurunan jumlah audiens media tradisional (televisi, radio, dan media cetak), menurunnya profit, serta klaim melebarnya kesenjangan antara media dan publik, berkembang biaknya hoaks (*fake news)* terkait peliputan sejumlah peristiwa politik besar pada tahun 2016 merupakan tantangan besar yang berdampak pada sektor media. Seperti halnya di negara lain, Indonesia sebagai salah satu negara dengan pengguna media sosial terbanyak di dunia juga sedang menghadapi tantangan penyebaran berita hoaks yang sangat meresahkan.

Fabrizio Moreira, politisi asal Ekuador yang hijrah ke Amerika Serikat karena menentang pemerintahan Rafael Carrera, mengatakan, "Berita bohong dapat dengan sederhananya telah menyebarkan informasi yang keliru atau dengan bahayanya memoles propaganda yang penuh dengan kebencian."

Apakah permasalahan yang dihadapi jurnalisme sebenarnya adalah masalah dengan budaya kita sendiri? Robert Biezenski, seorang profesor sosiologi, merasa bahwa di negara-negara lain media sedang memainkan peranan penting dalam perubahan di masyarakat. Surat kabar Barat sering kali hanya memberitakan pengungkapan masalah tanpa melihat perannya untuk menggerakkan masyarakat untuk peduli atau memecahkan masalah tersebut, sedangkan di bagian dunia lainnya dapat melihatnya.

Biezenski menunjuk pada Amerika Latin di mana kegiatan medianya sangat terkait dengan aktivitas politik dan selalu berpihak sebelah, dan ketika pemberitaannya terlalu jauh melangkah, sudah pasti akan terjadi kekerasan, wartawan terbunuh atau ditembak. Hal tersebut tidak terjadi di Amerika Utara karena jurnalis lebih menyentuh ke hal-hal yang praktis, berita *entertaint* dan *sports*. Dalam artian bahwa berita yang disampaikan tidak membuat jurnalisnya "layak untuk terbunuh". Sangat jarang menyentuh kepada sistem secara utuh yang berefek kepada kritik sosial, lebih kepada individu.

Media dan politik

Seperti halnya kondisi di Amerika Latin, media di Indonesia yang sebagian besar dimiliki pengusaha dan politisi pastinya akan memprioritaskan pemberitaan yang berat sebelah/berpihak. Stephen Whitworth, Pemimpin Redaksi *Prairie Dog*, berpendapat, sangatlah penting memastikan bahwa Anda terhubung dengan pembaca dan bahwa audiens Anda merasakan koran Anda adalah sesuatu yang nyaman untuk diambil dan dibaca.

Fokus jurnalisme bukan hanya fakta dari cerita, melainkan juga kemampuan untuk membentuk pemahaman akan cerita tersebut. Jurnalisme adalah sebuah proses seni. Jika Anda tidak memahami seni untuk berkomunikasi, menjangkau orang, dan menulis; Anda tidak akan dapat terhubung dengan masyarakat. Presentasi adalah penting untuk mendistribusikan informasi.

Keterikatan jurnalisme terhadap publik adalah bagaimana jurnalisme tersebut menjadi sesuatu yang dapat memperkuat kembali wacana publik dan ketertarikan mereka dalam politik. Jurnalisme harus menarik, dan relevan kepada publik. Apa yang terjadi saat ini adalah menarik, tetapi apa yang terjadi hari ini dan memberikan implikasi kepada kualitas hidup Anda di masa depan adalah penting.

> *Siapa pun yang menggeluti jurnalisme hendaknya terus bekerja menghadapi segala tantangan yang ada dan terus berupaya untuk mendidik masyarakat tentang apa yang sedang dikerjakan serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terbiasa dengan keberadaan media alternatif lainnya*

Siapa pun yang menggeluti jurnalisme hendaknya terus bekerja menghadapi segala tantangan yang ada dan terus berupaya untuk mendidik masyarakat tentang apa yang sedang dikerjakan serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terbiasa dengan keberadaan media alternatif lainnya. Fakta menunjukkan sebuah koran "alternatif" di Seattle bahkan mampu memenangi penghargaan bergengsi jurnalisme, Pulitzer.

Di dalam setiap tantangan atau hambatan selalu menawarkan tersedianya peluang. Jim Rutenberg dari harian *New York Times* menjelaskan, ledakan berita bohong/hoaks selama 2016 dapat saja justru meningkatkan nilai dari berita benar. Ia berkesimpulan: "Jika demikian halnya, jurnalisme hebatlah yang akan menjadi penyelamat jurnalisme itu sendiri." Jurnalisme asli, kritis, dan dari hasil telaah yang mendalam mungkin lebih dibutuhkan sekarang ini dibandingkan dengan masa yang lalu.

Yang harus kita sadari juga bahwa perubahan dan transformasi akan terus terjadi. Kemampuan untuk beradaptasi adalah hal yang sangat penting untuk mengantisipasinya dan jika perlu, lakukanlah revitalisasi.

Seperti diungkapkan Robert Biezenski: *"When society as a whole change, when the whole economy goes down the tube, when millions of people are suddenly unemployed. Then society will change. Not before. And then the media will change. Not before."* (Ketika masyarakat berubah secara utuh, ketika ekonomi jatuh, ketika jutaan orang tiba-tiba menganggur. Kemudian masyarakat akan berubah. Bukan sebelumnya. Dan kemudian media akan berubah. Bukan sebelum)

Selamat Hari Kemerdekaan Pers Sedunia! ***(Kompas 15 Mei 2017)***

SH Sarundajang adalah Anggota Dewan Pers

PENGURUS DEWAN PERS PERIODE 2016-2019:

- **Ketua:** Yosep Adi Prasetyo
- **Wakil Ketua:** Ahmad Djauhar
- **Anggota**: Anthonius Jimmy Silalahi, Imam Wahyudi, Nezar Patria, Hendry Chairudin Bangun, Ratna Komala, Reva Dedy Utama, Sinyo Harry Sarundajang
- **Sekretaris (Kepala Sekretariat):** Lumongga Sihombing

REDAKSI *ETIKA*:

- **Penanggung Jawab:** Yosep Adi Prasetyo
- **Redaksi:** Herutjahjo, Chelsia, Lumongga Sihombing, Ismanto, Dedi M Kholik, Wawan Agus Prasetyo, Reza Andreas (foto)

- **Surat dan Tanggapan Dikirim ke Alamat Redaksi:**

Gedung Dewan Pers, Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih 34, Jakarta 10110.
Tel. (021) 3521488, 3504877, 3504874 - 75, Faks. (021) 3452030
Surel: sekretariat@dewanpers.or.id
Twitter: @dewanpers
Laman: www.dewanpers.or.id / www.presscouncil.or.id

*(**ETIKA** dalam format pdf dapat diunduh dari website Dewan Pers: www.dewanpers.or.id)*

Dewan Pers Selesaikan 1 Pengaduan Melalui Mediasi. Sebanyak 4 PPR dikeluarkan

Pada Mei 2017, Dewan Pers berhasil menyelesaikan 1 (satu) pengaduan melalui mediasi dan ajudikasi yang dituangkan dalam Risalah Penyelesaian Pengaduan (Risalah) serta mengeluarkan 4 (empat) Pernyataan Pernilaian dan Rekomendasi (PPR).

Dewan Pers menggelar sidang mediasi di Jakarta sehingga menghasilkan Risalah Penyelesaian Pengaduan itu. Sedangkan Dewan Pers mengeluarkan PPR setelah menggelar sidang mediasi di Langkat Sumatera Utara dan Jakarta, namun tidak tercapai titik temu antara para pihak yang bersengketa. Karena tidak tercapai titik temu, Dewan Pers mengeluarkan PPR. Hal ini sesuai Pedoman Pengaduan ke Dewan Pers (Peraturan Dewan Pers Nomor 03/2013).

Risalah yang berhasil ditandatangani antara Pengadu dalam hal ini Hary Tanoesoedibjo yang diwakili Ricky K Margono dari LBH Perindo dengan Teradu yakni media online *tirto.id* adalah terkait berita berjudul "Investigasi Allan Nairn: Ahok Hanyalah Dalih untuk Makar" (diunggah pada Rabu, 18 April 2017, pukul 12.05 WIB).

Penandatanganan Risalah penyelesaian pengaduan kasus ini setelah Pengadu dan Teradu bersepakat atas pernilaian Dewan Pers bahwa berita Teradu melanggar Pasal 1 dan 3 Kode Etik Jurnalistik karena tidak berimbang, tidak uji informasi dan memuat opini yang menghakimi.

Foto: Etika/Retno Utami

MEDIASI – Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Imam Wahyudi (tengah) diantara Teradu (kiri) dan Pengadu (kanan) dalam penyelesaian sengketa pers antara Hary Tanoesoedibyo vs tirto.id di Jakarta, Selasa (13/4/2017)

Teradu wajib melayani Hak Jawab disertai permintaan maaf kepada Pengadu dan masyarakat yang ditautkan dengan berita yang diadukan sesuai dengan Pedoman Pemberitaan Media Siber (Peraturan Dewan Pers Nomor 1/2012).

Penandatanganan Risalah ini dilakukan di kantor Dewan Pers pada 24 Mei 2014. Sidang mediasi ini dipandu oleh Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers, Imam Wahyudi.

Sebanyak 4 PPR

Dewan Pers, seperti disebutkan di atas, mengeluarkan 4 (empat) PPR sepanjang Mei 2017. Pertama adalah PPR terkait Pengaduan PT. Angkasa Pura I (Persero) terhadap Majalah *Forum Keadilan*.

PT Angkasa Pura I (Persero) yang diwakili oleh Israwadi mengadu ke Dewan Pers tanggal 21 September 2016, terhadap berita Majalah *Forum Keadilan* (edisi 08, 5-18 September 2016) dengan sampul berjudul "Mega Korupsi Angkasa Pura I. Pembebasan Lahan Bandara Hasanuddin Dimark-Up Rp 360 M".

Di dalam edisi yang sama dimuat berita utama berjudul "Membongkar Mega Korupsi Angkasa Pura I" (lima halaman); wawancara berjudul "Ada Praktik Mark-up dan Salah Bayar" (satu halaman); berita berjudul "Jejak Perkara Tommy di Gedung Bundar" (dua halaman); kemudian

wawancara berjudul "Pembebasan Lahan Tanggungjawab P2T" (dua halaman); dan wawancara berjudul "Direksi AP I Harus Bertanggungjawab" (dua halaman).

Dewan Pers telah meminta klarifikasi kepada PT Angkasa Pura I pada tanggal 1 dan 16 Februari serta 2 dan 13 Maret 2017. Sedangkan *Forum Keadilan* memberikan klarifikasi pada tanggal 2 dan 13 Maret 2017. Pada gelaran klarifikasi tersebut, tidak tercapai kesepahaman untuk menyelesaikan pengaduan ini melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, karena *Forum Keadilan* menolak temuan penilaian Dewan Pers.

Setelah mempertimbangkan berbagai hal, Dewan Pers memutuskan *Forum Keadilan* melanggar Pasal 1 dan Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik karena tidak akurat dan memuat opini yang menghakimi. Hak Jawab dari Pengadu yang dimuat oleh Teradu belum cukup memadai/

Dewan Pers mengeluarkan rekomendasi, PT Angkasa Pura I mengajukan kembali Hak Jawab kepada *Forum Keadilan* yang berisi hal-hal yang belum dimuat pada Hak Jawab sebelumnya, paling lambat dua minggu setelah Penyataan Penilaian dan Rekomendasi ini diterima. PPR dikeluarkan tanggal 26 Mei 2017. Sedangkan Forum Keadilan memuat kembali Hak Jawab Pengadu (poin 1) disertai permintaan maaf kepada Pengadu dan pembaca.

Terkait rekomendasi itu, Dewan Pers menegaskan apabila tidak dilaksanakan oleh *Forum Keadilan*, maka PT Angkasa Pura I atau pihak lain yang merasa dirugikan, dapat membawa kasus ini ke proses hukum (pengadilan), dan pada masa depan, Dewan Pers tidak akan menangani masalah atau perkara pers yang terkait *Forum Keadilan*.. Dengan demikian setiap pihak yang merasa dirugikan oleh *Forum Keadilan* dapat langsung menempuh proses hukum tanpa lebih dulu mengadu ke Dewan Pers.

Kedua, PPR terkait Pengaduan C. Suhadi terhadap Majalah Berita Mingguan (MBM) *Tempo*. Suhadi adalah Tim Advokasi/Hukum (relawan) Basuki–Djarot atau Badja. Ia melalui surat elektronik tertanggal 27 Maret 2017, mengadukan berita Majalah *Tempo* berjudul "Sumpah Setya dan Koleganya" edisi 13-19 Maret 2017 ke Dewan Pers.

Setelah melalui mekanisme penyelesaian pengaduan sebagaimana lazimnya di Dewan Pers, akhirnya Dewan Pers mengeluarkan PPR karena keduanya tidak dapat bertemu karena berbagai hal sebagaimana disebutkan dalam diktum Menimbang PPR ini.

Dewan Pers memutuskan *Tempo* tidak melanggar Kode Etik Jurnalistik. Berita Tempo merupakan bagian dari pelaksanaan salah satu fungsi pers yakni melakukan kontrol sosial. Karena itu, Dewan Pers merekomenedasikan agar para pihak lebih menjalin komunikasi dan saling memahami tugas pokok dan fungsi masing-masing, sementara *Tempo* tetap menjalankan fungsi kontrolnya dengan mematuhi Kode Etik Jurnalistik.

Sedangkan PPR yang ketiga dan keempat adalah terkait Surat Kabar *Langkat Project* dan media online *Langkatproject.com* atas pengaduan Bupati Langkat, H Ngogesa Sitepu ke Dewan Pers tanggal 23 Februari 2017. *Langkat Project* diadukan atas 13 berita dan *Langkatproject.com* sebanyak 4 berita. Serangkaian berita yang ditayangkan kedua media yang merupakan satu grup ini oleh Ngogesa melalui kuasa hukumnya dari Firma Hukum Bambang Santoso & Partner, dinilai tidak akurat, menghakimi dan fitnah. Bahkan menurut Pengadu berita-berita tersebut bukan merupakan karya jurnalistik.

Setelah melalui mediasi tetapi tidak mencapai titik temu, Dewan Pers mengeluarkan PPR untuk *Langkat Project* yang dalam keputusannya menyatakan dari 13 (tiga belas) berita yang diadukan, sebanyak 4 (empat) berita tidak melanggar Kode Etik Jurnalistik (KEJ) , 9 (sembilan) berita melanggar Pasal 1, dan 3 KEJ karena tidak uji informasi dan tidak berimbang, di mana 4 (empat) berita diantaranya menghakimi. Sedangkan untuk *Langkatproject.com* diputuskan, tiga berita melanggar Pasal 1 dan 3 Kode Etik Jurnalistik karena tidak uji informasi dan tidak berimbang. Satu berita selebihnya, selain tidak uji informasi dan tidak berimbang juga memuat opini menghakimi.

Karena itu dalam Rekomendasinya Dewan Pers menyatakan, kedua media ini wajib melayani Hak Jawab dan meminta maaf kepada Ngogesa dan masyarakat sebanyak berita yang diputuskan menghakimi tersebut.

Keputusan-keputusan tersebut dapat dilihat di website Dewan Pers www.dewanpers.or.id **(Red)**